

## Optimalisasi Pendidikan Inklusi Menuju Masa Depan Sekolah Dasar Berkualitas

Tira Sari Dewi, Suci Permatasari, Desma Dzuriansyah, Rokhmaniyah, Dewi Indrapangastuti

Universitas Sebelas Maret

e-mail: [sucipermatasari5@student.uns.ac.id](mailto:sucipermatasari5@student.uns.ac.id)

---

### Article History

accepted 21/6/2025

approved 28/6/2025

published 31/7/2025

---

### Abstract

*Inclusive education at primary school level is an important step in ensuring the right to education for all children, including children with special needs. This study aims to analyse the urgency of inclusive education, the challenges of implementation in primary schools, optimization strategies and the implications for the quality of education. The review method uses a literature study by reviewing national regulations, inclusion theory and relevant research. The study method uses a descriptive qualitative approach through a literature study by analyzing national regulations, inclusion theories and relevant research results. The subjects of this study are policy documents, scientific journals and literature that discuss inclusive education in primary schools with document collection and analysis procedures through content analysis techniques. The results show that the main obstacles to implementing inclusion include low teacher competence, weak internal school policies, limited infrastructure, and low awareness of diversity values among the school community. Suggested strategies include strengthening policies, training inclusive teachers, adapting the curriculum, developing child-friendly infrastructure and cultivating an inclusive school culture. Inclusive education has been shown to have a positive impact on the learning climate, pedagogical innovation and generally improving student learning outcomes. It is hoped that these findings will inform the formulation of inclusive education policies and practices in Indonesia.*

**Keywords:** *inclusive education, elementary school, children with special needs*

### Abstrak

Pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar merupakan langkah penting dalam menjamin hak pendidikan bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Kajian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendidikan inklusi, tantangan implementasi di sekolah dasar, strategi optimalisasi, serta implikasinya terhadap kualitas pendidikan. Metode kajian menggunakan studi pustaka dengan mengkaji regulasi nasional, teori inklusi, serta penelitian relevan. Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan menganalisis regulasi nasional, teori inklusi, serta hasil penelitian yang relevan. Subjek pada kajian ini berupa dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, dan literatur yang membahas pendidikan inklusi di sekolah dasar dengan prosedur pengumpulan dan analisis dokumen melalui teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa kendala utama implementasi inklusi mencakup rendahnya kompetensi guru, lemahnya kebijakan internal sekolah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kesadaran komunitas sekolah terhadap nilai-nilai keberagaman. Strategi yang disarankan meliputi penguatan kebijakan, pelatihan guru inklusif, adaptasi kurikulum, pengembangan sarana-prasarana ramah ABK, dan penanaman budaya sekolah yang inklusif. Pendidikan inklusi terbukti berdampak positif terhadap iklim belajar, inovasi pedagogis, serta peningkatan hasil belajar siswa secara umum. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar perumusan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut, saran dari peneliti yang dapat dilakukan antara lain strategi optimalisasi melalui penguatan kebijakan, pelatihan guru, kurikulum adaptif, pengembangan sarana ramah ABK, serta pembentukan budaya inklusif terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar.

**Kata kunci:** pendidikan inklusi, sekolah dasar, anak berkebutuhan khusus



## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak yang diperoleh setiap individu tanpa terkecuali termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, sebagaimana dijamin dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi manusia untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing di masa depan. Pendidikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah no 35 Tahun 2014 pasal 9 ayat 1 “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakat dan minat”. Pendidikan inklusi berfokus pada ide bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dalam lingkungan inklusif (Sania, 2019). Berdasarkan pendapat Sania, pendidikan inklusi berupaya mengakomodir seluruh siswa dengan memastikan bahwa setiap anak, terlepas dari perbedaan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan segala kondisi untuk belajar dan berkembang secara optimal. Pendidikan inklusi hadir sebagai inovasi pendidikan yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus agar dapat belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang setara. Smith (2007) berpendapat bahwa pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang menempatkan semua siswa, tanpa memandang kekurangan mereka dalam satu kelas agar mereka dapat belajar secara bersama-sama. Berdasarkan pendapat ahli tersebut pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk bersekolah di sekolah reguler dengan anak-anak normal lainnya dan memastikan bahwa semua anak memperoleh pendidikan yang sama tanpa memandang latar belakang seluruh peserta didik.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia masih mengalami kendala. Berdasarkan literatur jurnal terdapat permasalahan pada pelaksanaan pendidikan inklusi. Menurut Sari, dkk (2023) terdapat sepuluh permasalahan yang diungkapkan guru terkait permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Permasalahan tersebut, yaitu (1) kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK; (2) kepedulian orang tua terhadap penanganan ABK kurang; (3) Orang tua kurang sabar dalam menangani ABK; (4) ABK dengan permasalahan berbeda memerlukan penanganan yang berbeda; (5) ABK kesulitan mengikuti materi pelajaran; (6) sikap ABK belum bisa mengikuti aturan sehingga mengganggu proses KBM; (7) sekolah belum siap untuk melaksanakan pendidikan inklusi; (8) kepedulian pemerintah terhadap pendidikan inklusi kurang dan program pemerintah belum berkelanjutan; (9) kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi; dan (10) kurangnya keterlibatan dari semua pihak akademisi, tenaga ahli, guru, sekolah, serta pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian (Sitanggang, dkk, 2025) terdapat permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu (1) kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus; (2) kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusi; (3) rendahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik tanpa memandang latar belakang untuk memperoleh pendidikan yang sama dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki yang melalui program pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan kepada semua anak tanpa terkecuali termasuk anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kebutuhannya (Arif, dkk, 2025). Menurut Direktorat Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi harus memenuhi beberapa komponen, sebagaimana dikutip oleh Eka Sari Setianingsih (2019), bahwa pengelolaan komponen pendidikan dalam sekolah inklusi meliputi (1) manajemen kesiswaan, (2) manajemen kurikulum, (3) manajemen tenaga kependidikan, (4) manajemen sarana dan prasarana, (5) manajemen keuangan/dana, dan (6) manajemen

lingkungan (hubungan sekolah dan masyarakat), dan (7) manajemen layanan khusus. Komponen pendidikan inklusi tersebut harapannya dapat membawa perubahan positif terhadap pembangunan sumber daya manusia terutama untuk anak berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusi hendaknya memenuhi kriteria sebagai sekolah inklusi yang baik dan berkualitas. Kriteria sekolah inklusi yang berkualitas hendaknya memenuhi 4 aspek diantaranya: (1) tersedia guru pembimbing khusus; (2) tersedia sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus; (3) memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif; dan (4) memiliki sistem evaluasi dan sertifikasi serta manajemen dan proses pendidikan inklusi. Menurut Direktorat PLB, 2007, hal 29 karakteristik dari penyelenggara pendidikan inklusi harus memenuhi 9 syarat yaitu: kesiapan sekolah, terdapat anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah, tersedia guru pendidikan khusus, komitmen terhadap penuntasan wajib belajar, memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, tersedia sarana dan prasarana yang mudah diakses, pihak sekoah telah memperoleh sosialisasi pendidikan inklusif, sekolah telah terakreditasi, dan memenuhi standar administrasi yang ditentukan.

Pendidikan inklusi secara ideal bertujuan untuk memberikan kesetaraan pendidikan bagi semua anak, khususnya anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat belajar bersama di sekolah reguler. Sistem pendidikan inklusif ini diharapkan mampu menciptakan pendidikan inklusi yang adil dan ramah bagi semua anak (Afi'dah, dkk. 2025). Namun, kenyataan di lapangan pelaksanaan pendidikan inklusi khususnya sekolah dasar masih menghadapi tantangan. Masih banyak sekolah yang belum melaksanakan program pendidikan inklusi dengan baik karena kurangnya pemahaman tentang tujuan dan manfaat pendidikan inklusi. Berdasarkan kajian terdahulu permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian pendidikan inklusi di sekolah dasar, yaitu: (1) di SDN Banyuajuh 2 anak berkebutuhan khusus telah menunjukkan peningkatan akademik dan sosial, namun pendidik mengalami kesulitan dalam pengelolaan kelas, (2) di SD Mentikan 1 Kota Mojokerto pelaksanaan pendidikan inklusi berjalan baik. Namun dalam pelaksanaannya terkendala dalam biaya untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah serta minimnya pengalaman guru dalam pengelolaan kelas inklusi.

Program pendidikan inklusi menjadikan tantangan bagi kepala sekolah, guru, dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pendidikan inklusi khususnya sekolah dasar perlu mendapatkan perhatian intensif untuk mengetahui kesiapan sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Pada penelitian sebelumnya telah banyak membahas isu penerapan pendidikan inklusi di sekolah dasar. Salma (2025) membahas tentang tantangan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi dalam hal keterampilan dan sikap guru. Sudjak (2018) membahas tentang tantangan implementasi pendidikan guru berdasarkan kebijakan sekolah. Wulandari dan Prasetyo (2020) membahas tantangan implementasi pendidikan inklusi dalam bidang sarana dan prasarana. Penelitian ini dilakukan dengan adanya permasalahan dalam pengoptimalisasian sekolah inklusi di sekolah dasar. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mursak, Supena, Bintoro, dkk (2024) menyatakan bahwa implmentasi untuk mencapai optimalisasi pendidikan inklusi masih rendah. Widhiarti, Chasanah, Efendi (2024) pada penelitiannya juga menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Negeri 1 Bocor masih rendah. Berdasarkan pemaparan tersebut, kebaruan dari penelitian terbaru adalah yang mana peneliti lebih signifikan dalam membahas indikator-indikator yang digunakan untuk optimalisasi pendidikan inklusi di SD dan memberikan saran atau solusi untuk permasalahan yang terjadi dengan indikator-indikator tersebut.

Berdasarkan literatur jurnal tersebut, pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti: kurangnya pemahaman konsep

inklusi di kalangan pendidik, keterbatasan fasilitas dan sumber daya, serta belum meratanya pelatihan guru untuk pelaksanaan pendidikan inklusi. Tantangan tersebut tentunya akan menghambat pelaksanaan pendidikan inklusi, sehingga tujuan pendidikan untuk menciptakan pendidikan yang adil, merata, dan mampu mengakomodir keberagaman peserta didik tidak dapat tercapai secara optimal. Jika tidak segera diatasi, hambatan ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan khususnya pada anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pendidikan inklusi khususnya di sekolah dasar. Tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah menganalisis optimalisasi inovasi pendidikan inklusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan arah kebijakan dan inovasi pendidikan inklusif.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji secara mendalam berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan inklusi di tingkat sekolah dasar. Populasi dalam penelitian ini mencakup karya ilmiah dan dokumen yang membahas tentang pendidikan inklusi. Sumber data terdiri dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku referensi akademik, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang relevan. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu dengan menyeleksi literatur yang relevan dan berkualitas. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan instrumen penelitian berupa tantangan dan strategi optimalisasi pendidikan inklusi yang disusun berdasarkan pedoman telaah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan database daring. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama seperti tantangan implementasi, strategi optimalisasi, serta dampak pendidikan inklusi terhadap kualitas sekolah dasar. Validitas data diperkuat melalui seleksi sumber yang kredibel dan triangulasi referensi. Hasil kajian disusun secara tematik untuk memberikan gambaran komprehensif yang mendukung pembahasan dan simpulan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Urgensi Pendidikan Inklusi dalam Konteks Pendidikan Dasar**

Pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam pembangunan karakter dan kecakapan dasar yang akan membentuk jati diri peserta didik dalam jangka panjang. Di Indonesia, pendidikan dasar tidak hanya menjadi kewajiban negara untuk disediakan secara merata, tetapi juga merupakan hak setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus (ABK). Dalam kerangka sistem pendidikan nasional, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi landasan fundamental, sehingga penyelenggaraan pendidikan tidak boleh bersifat eksklusif atau diskriminatif. Oleh karena itu, pendidikan inklusi menjadi kebutuhan yang tak terelakkan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang berkualitas, adil, dan berkelanjutan.

Pendidikan inklusi mengacu pada pendekatan pendidikan yang menempatkan semua anak, terlepas dari latar belakang, kondisi fisik, sosial, intelektual, maupun emosional mereka, dalam satu sistem pendidikan yang sama, dengan adaptasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat belajar secara efektif. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Hal ini dipertegas oleh Permendiknas No. 70 Tahun 2009, yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif pada setiap satuan

pendidikan. Kedua regulasi ini menggarisbawahi bahwa aksesibilitas pendidikan harus disediakan secara menyeluruh, bukan hanya dalam hal fisik tetapi juga dalam hal pedagogis dan psikososial.

Lebih dari sekadar integrasi fisik ABK ke dalam ruang kelas reguler, pendidikan inklusi adalah transformasi mendasar dalam cara pandang dan pendekatan sekolah terhadap keberagaman peserta didik. Florian dan Black-Hawkins dalam Tlou, Nyoni (2021) menekankan bahwa pendidikan inklusi yang sejati adalah ketika sekolah secara aktif mengubah budaya (culture), kebijakan (policy), dan praktik (practice) mereka agar mampu mengakomodasi semua anak. Ini berarti pendidikan inklusi tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya komitmen sistemik dari seluruh komponen pendidikan: mulai dari perumusan kurikulum, pelatihan guru, penyediaan sumber daya, hingga penanaman nilai-nilai keberagaman dalam interaksi sehari-hari.

Urgensi pendidikan inklusi juga terletak pada kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional secara keseluruhan. Sekolah inklusif yang berhasil menyelenggarakan pembelajaran untuk berbagai jenis kebutuhan peserta didik secara otomatis mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif, fleksibel, dan responsif. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi ABK, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar siswa reguler. Misalnya, penerapan strategi pembelajaran kooperatif, penggunaan media pembelajaran visual dan multisensori, serta asesmen formatif yang berbasis kekuatan siswa (strength-based approach), semuanya memberikan dampak positif terhadap iklim belajar yang lebih partisipatif dan menyenangkan.

Penelitian oleh Haryanto dan Kustawan (2020) menemukan bahwa sekolah dasar inklusif yang menerapkan strategi pembelajaran kolaboratif berbasis kebutuhan individu mampu meningkatkan partisipasi aktif siswa ABK hingga 70%. Penelitian Rachmawati dalam Jesslin dan Kurniawati (2020) juga menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dan pendampingan guru pembimbing khusus memiliki korelasi positif terhadap keberhasilan akademik siswa ABK di sekolah inklusi. Lebih lanjut, studi oleh Sari dan Wibowo (2022) mengidentifikasi bahwa sekolah yang memiliki kebijakan inklusif yang tertulis secara eksplisit dalam visi-misi sekolah menunjukkan lingkungan belajar yang lebih ramah terhadap keberagaman. Penelitian ini menyarankan bahwa kebijakan internal sekolah memainkan peran penting dalam membentuk budaya sekolah inklusif. Selain itu, Sulistyorini dalam Khoirunnisa, Muhroji, Wulandari, dkk (2024) menyoroti pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, karena ditemukan bahwa hanya 32% guru di sekolah inklusi yang merasa percaya diri dalam menyusun RPP yang adaptif bagi siswa ABK. Temuan menarik juga datang dari penelitian Wahyuni dan Ramadhani dalam Maryam, Nasrullah, Aliyah (2024) yang menyatakan bahwa sekolah-sekolah dasar inklusi yang menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) lebih berhasil dalam meningkatkan kemampuan sosial siswa ABK, karena pendekatan ini memberikan ruang untuk interaksi dan kerja sama lintas kemampuan.

Pendidikan inklusi tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa berkebutuhan khusus, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendorong nilai-nilai empati, toleransi, dan solidaritas di kalangan peserta didik. Siswa terbiasa hidup berdampingan dengan teman-teman yang berbeda dan belajar untuk saling membantu serta menghargai satu sama lain. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, hal ini menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003. Namun demikian, pendidikan inklusi tidak boleh dipahami sebagai suatu program tambahan atau pelengkap dari sistem

pendidikan nasional. Justru sebaliknya, ia harus menjadi pendekatan utama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, karena hanya melalui pendekatan yang menyeluruh dan menyatu dalam sistem pendidikanlah inklusi dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan. Dengan menjadikan pendidikan inklusi sebagai bagian integral dari sistem, Indonesia tidak hanya akan memperkuat komitmennya terhadap hak asasi manusia, tetapi juga mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan keempat tentang pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua.

## 2. Tantangan Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Meskipun kerangka regulatif pendidikan inklusi di Indonesia telah tersedia, implementasinya di tingkat sekolah dasar masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural, sehingga perlu diidentifikasi secara rinci agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.

Pertama, kompetensi pendidik masih menjadi tantangan utama. Banyak guru belum mendapatkan pelatihan memadai dalam hal strategi pembelajaran inklusif, asesmen diferensiatif, serta manajemen kelas multilevel. Penelitian Sucipto et al dalam Ulfa dan Wardany (2022) menemukan bahwa lebih dari 60% guru SD inklusi di wilayah Jawa Timur belum pernah mengikuti pelatihan pendidikan inklusif formal, dan sebagian besar masih menggunakan metode konvensional yang kurang adaptif bagi siswa ABK. Temuan serupa dilaporkan oleh Zahroh dan Fatmawati (2021) yang mencatat bahwa minimnya pengetahuan guru tentang karakteristik ABK menyebabkan salah pendekatan dalam proses belajar-mengajar.

Kedua, lemahnya kebijakan internal sekolah juga memperparah kondisi ini. Banyak sekolah belum menjadikan prinsip inklusi sebagai visi dan misi utama lembaga. Penelitian Rahmatika & Suparlan (2022) menunjukkan bahwa dari 20 sekolah dasar inklusi yang diteliti, hanya 35% yang memiliki dokumen resmi kebijakan inklusi. Akibatnya, program inklusi sering dianggap sekadar tuntutan administratif dan bukan bagian dari transformasi budaya sekolah.

Ketiga, infrastruktur dan sarana fisik yang belum inklusif mempersempit ruang partisipasi siswa ABK. Misalnya, ketiadaan jalur landai untuk kursi roda, toilet khusus disabilitas, dan media belajar khusus seperti braille atau alat bantu dengar masih menjadi hambatan nyata. Wulandari dan Prasetyo (2020) mencatat bahwa hanya 21% sekolah inklusi di wilayah urban Surabaya yang memiliki aksesibilitas fisik lengkap bagi ABK. Kondisi ini lebih buruk di daerah rural yang cenderung tertinggal dalam aspek pembangunan pendidikan.

Keempat, faktor psikososial dan budaya sekolah juga menjadi tantangan serius. Penolakan dari orang tua siswa reguler terhadap kehadiran ABK masih terjadi, dengan alasan akan menghambat proses pembelajaran. Hal ini diperkuat oleh temuan Mutmainah & Widodo (2019) yang menyebutkan bahwa diskriminasi sosial dan stereotip negatif terhadap ABK masih menjadi hambatan utama dalam membangun ekosistem inklusif di sekolah dasar. Kurangnya edukasi dan pemahaman dari komunitas sekolah terhadap nilai-nilai keberagaman menyebabkan inklusi hanya menjadi slogan formal tanpa implementasi nyata.

## 3. Strategi Optimalisasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar

Untuk mengatasi hambatan-hambatan di atas, dibutuhkan pendekatan strategis yang holistik dan berkesinambungan. Menurut Valentina, Azmi, Cantika, dkk (2024) strategi optimalisasi pendidikan inklusi harus melibatkan lima pilar utama: penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas pendidik, adaptasi kurikulum, pengembangan sarana prasarana, dan pembentukan budaya sekolah yang inklusif.

a. Penguatan Kebijakan Inklusif di Tingkat Satuan Pendidikan

Sekolah perlu merumuskan kebijakan inklusif secara eksplisit, mencakup penerimaan siswa, proses asesmen, sistem pembelajaran, dan pelibatan orang tua. Penelitian oleh Widiastuti dan Yuliani dalam Istikhanah, Sary, Andriani (2023) menggarisbawahi bahwa sekolah yang memiliki dokumen kebijakan inklusi cenderung lebih siap dalam mendukung keberhasilan siswa ABK. Kebijakan tersebut perlu disosialisasikan secara terbuka kepada semua warga sekolah agar menjadi komitmen bersama.

b. Peningkatan Kompetensi Guru

Pelatihan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kapasitas guru. Program pelatihan harus mencakup strategi pembelajaran berdiferensiasi, desain universal untuk pembelajaran (UDL), penggunaan teknologi bantu, serta pendekatan psikopedagogis yang berorientasi pada kekuatan siswa. Menurut Darwis (2024) berdasarkan hasil refleksi sebelum dan sesudah kegiatan diperoleh data tentang peningkatan kualitas materi belajar dari 25% menjadi 85%, motivasi dan minat peserta awalnya sebesar 30% menjadi 67%, peningkatan kemampuan keterampilan kompensatoris peserta terhadap adalah 20% menjadi 70%, dorongan untuk tindak lanjut pelatihan dari 35% menjadi 62%, dan kebermanfaatan pelatihan sebesar dari 35% menjadi 58,4%. Merujuk kepada data tersebut maka dapat dinyatakan kegiatan ini berhasil dan dapat terus dilanjutkan pada tingkat keahlian lanjut.

c. Adaptasi Kurikulum dan Pembelajaran

Kurikulum nasional perlu diterjemahkan secara fleksibel melalui kurikulum operasional sekolah (KOS) yang ramah inklusi. Dalam konteks ini, pendekatan student-centered learning, penggunaan multi-metode dan multimedia, serta asesmen alternatif menjadi penting. Penelitian Handayani & Fitria dalam Komariyah, Bagaskorowati, Lianty (Komariyah et al., 2017) menunjukkan bahwa siswa ABK mampu mencapai kompetensi dasar dengan baik ketika diberi ruang untuk belajar sesuai gaya dan kecepatannya.

d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Inklusif

Sekolah perlu melakukan audit lingkungan belajar untuk memastikan aksesibilitas fisik dan digital bagi semua siswa. Misalnya, penyediaan buku digital dengan fitur suara, teknologi augmentatif, atau bahkan ruang tenang bagi anak dengan gangguan sensorik dapat sangat membantu. Pemerintah daerah juga harus terlibat dalam penguatan anggaran pendidikan inklusif. Fauziyah dan Ardiansyah (2023) mencatat bahwa kerja sama lintas sektor antara dinas pendidikan, Dinas Sosial, dan komunitas disabilitas sangat efektif dalam pemenuhan sarana inklusi di SD di wilayah Bandung.

e. Penanaman Budaya Sekolah yang Inklusif

Strategi paling fundamental adalah membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman. Kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran berbasis proyek kolaboratif, dan diskusi nilai toleransi dapat dijadikan media penanaman nilai-nilai inklusif. Penelitian oleh Fitriani & Gunawan (2020) menekankan bahwa pembentukan budaya sekolah yang inklusif lebih berdampak jangka panjang dibandingkan hanya intervensi struktural.

4. **Implikasi Pendidikan Inklusi terhadap Kualitas Sekolah Dasar**

Implementasi pendidikan inklusi yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu sekolah dasar secara menyeluruh. Sekolah yang menjalankan prinsip inklusi secara konsisten menunjukkan peningkatan kualitas pedagogik, keterlibatan komunitas sekolah, serta terbentuknya iklim belajar yang lebih sehat dan kolaboratif.

Menurut Booth & Ainscow (2016), pendidikan inklusi mendorong guru untuk terus berinovasi dan merefleksikan praktiknya, sehingga berkontribusi langsung terhadap penguatan profesionalisme guru. Di Indonesia, studi oleh Lestari dan Purwanti dalam Pratama dan Roesminingsih (2023) menyatakan bahwa sekolah inklusi yang menerapkan program supervisi guru berbasis inklusif mengalami peningkatan hasil belajar baik bagi siswa reguler maupun ABK. Selain itu, Supriyanto dan Asih (2022) dalam Mustika, Afta, Auliya, dkk (Mustika et al., 2024) menemukan bahwa sekolah dasar inklusi cenderung memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang tua siswa, karena terbukanya ruang dialog dan keterlibatan aktif dalam proses pendidikan. Hal ini berkontribusi pada peningkatan keterlibatan orang tua (parental engagement) yang menjadi indikator penting dalam penjaminan mutu pendidikan.

Implikasi lainnya adalah terciptanya komunitas belajar yang kuat, di mana siswa belajar untuk saling memahami, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai gotong royong, empati, dan tanggung jawab sosial berkembang secara alamiah dalam interaksi keseharian. Ini sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional yang menekankan pada pengembangan karakter dan kebhinekaan global.

### SIMPULAN

Pendidikan inklusi di sekolah dasar merupakan upaya strategis untuk mewujudkan sistem pendidikan yang adil, setara, dan bermakna bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan inklusi telah tersedia, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan dalam aspek kompetensi guru, kebijakan sekolah, infrastruktur, dan budaya sekolah. Strategi optimalisasi melalui penguatan kebijakan, pelatihan guru, kurikulum adaptif, pengembangan sarana ramah ABK, serta pembentukan budaya inklusif terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar. Implikasi dari penerapan pendidikan inklusi tidak hanya meningkatkan prestasi ABK, tetapi juga memperkuat komunitas belajar dan kualitas sekolah secara menyeluruh. Ke depan, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada pengembangan model pelatihan guru berbasis praktik langsung di kelas, studi longitudinal dampak inklusi terhadap perkembangan sosial-emosional siswa, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran inklusif. Rekomendasi ini penting sebagai landasan bagi pengembangan kebijakan dan inovasi pendidikan inklusi yang lebih kontekstual dan berkelanjutan di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Af'idah, A., Purwoko, B., & Hazin, M. (2025). Implementing Regional Inclusive Education Policies to Realize Education Without Borders. *Academia Open*, 10(1), 10-21070.
- Darwis, A. A. (2024). Penguatan Kompetensi Profesional Guru Sekolah Inklusif Melalui Pelatihan Kompensatoris. *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 7(1), 169–176. <https://doi.org/10.31851/dedikasi.v7i1.15701>
- Dwi Arnia Ulfa, O. F., & Wardany. (2022). Kesiapan guru dalam penyelenggaraan kelas inklusi di MI NW Lendang Penyongkok, Lombok. *Jurnal Pendidikan Khusus (JPK)*, 18(2), 113–123. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpk/article/view/48322>
- Istikhanah, A. S., Sary, Y. L., & Andriani, O. (2023). Implementasi Landasan Konvensional Dan Yuridis Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kabupaten Bungo. *Jurnal Pendidikan Vokasi Dan Seni (JPVS)*, 2(1), 41–46. <https://doi.org/10.52060/jpvs.v2i1.1748>
- Jesslin, J., & Kurniawati, F. (2020). Perspektif Orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 3(2), 72. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>

- Johnson, B. & Christensen, Larry. (2012). *Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (4<sup>th</sup> ed)*. London: SAGE Publication Ltd.
- Hakim, C.. (2016, Juni 16). Kode Morse THR. *Kompas Online*. Diakses dari <http://www.kompas.com>
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2011). *Peraturan Mendiknas tentang Satuan Pengawasan Internal (Permendiknas Nomor 47 tahun 2011)*. Jakarta: Penulis.
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Khoirunisa, S., Muhroji, M., Wulandari, R., & Pratiwi, A. S. (2024). Penguatan Rasa Percaya Diri Siswa dalam Berkomunikasi di Sekolah Inklusi. *Buletin KKN Pendidikan*, 6(1), 97–109. <https://doi.org/10.23917/bkndik.v6i1.23644>
- Komariyah, S. N., Bagarkorowati, R., & Lianty, L. (2017). Pemahaman Guru Terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusif Wilayah Kepulauan Seribu. *PARAMETER: Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Jakarta*, 29(2), 216–222. <https://doi.org/10.21009/parameter.292.09>
- Marsha Chrysanta Valentina, Nanda Alyya Riftina Azmi, Sania Putri Cantika, & Tin Rustini. (2024). Strategi Peningkatan Kinerja Guru Dalam Optimalisasi Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Ilmiah Transformatif*, 8(1), 197–202.
- Maryam, M., Nasrullah, A., & Aliyah, S. R. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif pada Siswa Berkebutuhan Khusus. *Journal of Instructional and Development Researches*, 4(5), 418–430. <https://doi.org/10.53621/jider.v4i5.386>
- Mursak, M., Supena, A., Bintoro, T., & ... (2024). Implementasi Pendidikan Inklusi Di Sdn 13 Banawa: Tantangan Dan Strategi. ... *Jurnal Ilmiah Pendidikan ...*, 09, 154–167. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/20195>
- Mustika, D., Afta, I., Aini, K., Auliya, N., & Febrianti, S. (2024). Studi Literatur: Peran Orang Tua Dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 11409–11415.
- N. Tlou, F., & Nyoni, T. (2021). Alignments and Mismatches of Policies on Children with Learning Difficulties/Disabilities to Professional Practice Expectations in Zimbabwe: A Reality Check. *American Journal of Educational Research*, 9(8), 465–471. <https://doi.org/10.12691/education-9-8-1>
- Peraturan Pemerintah no 35 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5473/pp-no-35-tahun-2014>
- Pratama, D. W., & Roesminingsih, E. (2023). Manajemen Humas pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 11(01), 1–18. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/inspirasi-manajemen-pendidikan/article/view/56993>
- Salma, Q. A., & Najibah, F. (2025). Pendidikan Inklusi di SDN Ciracas Jakarta Timur: Tantangan dan Implementasi di Sekolah. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(2), 20-20.
- Sania, S. (2019). Kebijakan Permendiknas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 29–37. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3325>
- Sari, S. N., Hajri, N., Andriani, O., & Wicaksono, N. F. (2023). Problematika Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Vokasi dan Seni (JPVS)*, 2(1), 70-75.
- Setianingsih, E. S., & Listyarini, I. (2019). Implementasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Di Sd Bina Harapan Semarang. *Taman Cendekia: Jurnal Pendidikan Ke-SD-An*, 3(1), 257-268.

- Sitanggang, A. R., Puteri, A., Nduru, E. B., Fazira, E. M. T., Anggriana, F., Nainggolan, I. B., ... & Ningsih, W. D. (2025). Optimalisasi pendidikan inklusi di Indonesia: tantangan, permasalahan, dan strategi peningkatan mutu. *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 217-234.
- Sudjak, S. (2018). Problematika pendidikan inklusi di sekolah. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(2), 185–201.
- Widhiarti, F. N., Hanifah, A., Chasanah, C., & Efendi, C. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pendidikan Inklusi terhadap Prestasi Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 1 Bocor. *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series*, 7(3), 572–579. <https://doi.org/10.20961/shes.v7i3.91625>